

Outline Journal of Economic Studies

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJES>

Research Article

Analysis of the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in the Financial Statements of Medan City Government

(Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan)

Putri Kemala Lubis¹, Khairani Matondang², Donita Nababan³, Nursandi Sihombing⁴, Reginta Barus⁵

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: putrikemala@unimed.ac.id

Keyword:

Accrual Basis;
Accountability;
Financial Statements;
Government Accounting
Standards;
Local Government.

Article history

Received:
19 April 2026

Revised:
03 May 2026

Accepted:
04 May 2026

Available Online:
07 May 2026

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards (GAS) in the financial statements of the Medan City Government. The implementation of accrual-based SAP is the government's effort to improve the quality of transparent and accountable financial reports in accordance with applicable regulations. **Methods:** The method used in this study is qualitative, using a literature review approach and secondary data obtained from previous research and official data from the Central Statistics Agency (BPS). **Results:** Accrual-based Government Accounting Standards (GAS) is an accounting system that recognizes revenue, expenses, assets, liabilities, and equity in comprehensive financial reporting, thereby providing a more accurate picture of the financial condition. The results of the study indicate that the implementation of accrual-based SAP in regional government financial reports has generally been successful and in accordance with applicable standards. This is demonstrated by increasingly structured regional financial management and improvements in the transparency and accountability of financial reports. Data on Medan City's regional revenue realization in 2020 also indicates that the regional government has managed its finances quite well to support the implementation of government activities. **Conclusions:** Thus, the implementation of accrual-based SAP has an important role in improving the quality of local government financial reports and supporting the creation of good governance.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui, mencatat, dan melaporkan pendapatan, beban, aset, kewajiban, serta ekuitas pada saat terjadinya transaksi,

baik yang melibatkan kas maupun non kas. Penerapan SAP berbasis akrual bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dan mampu mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh (Ardiansyah, 2013). Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bastian, 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada entitas pemerintahan (Sudiaranti et al., 2026). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Prayogo, 2023). Penerapan SAP bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan antar entitas pemerintah, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar instansi (BPK Perwakilan Provinsi Jambi, n.d.). Keseragaman ini sangat penting dalam mendukung proses evaluasi kinerja keuangan serta pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kepentingan (Suartini et al., 2023).

Meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) telah mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Effendi, 2021). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi dan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pelaporan keuangan yang mampu memberikan informasi yang jujur, relevan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Peralihan dari basis kas menuju basis akrual merupakan salah satu perubahan mendasar dalam sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Basis kas hanya mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya, tanpa bergantung pada arus kas.

Menurut Halim (2016), akuntansi berbasis akrual mampu memberikan informasi yang lebih lengkap karena mencerminkan seluruh hak dan kewajiban pemerintah secara lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dibandingkan dengan basis kas. Selain itu, penerapan SAP berbasis akrual juga memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyatakan bahwa sistem akrual dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan karena mampu menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fahmi (2017) yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, karena menyediakan informasi yang lebih rinci terkait biaya dan manfaat dari setiap kegiatan pemerintah. Selain itu, Bastian (2015) juga menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis akrual mampu memberikan gambaran kinerja yang lebih baik karena mencakup seluruh pendapatan dan beban dalam suatu periode, baik yang telah direalisasikan dalam bentuk kas maupun yang belum (Fanselski & Kalangi, 2015).

Namun demikian, dalam implementasinya, penerapan SAP berbasis akrual masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem akrual, kurangnya pelatihan dan sosialisasi, serta belum optimalnya sistem informasi akuntansi yang digunakan. Selain itu, faktor komitmen organisasi dan dukungan manajemen juga menjadi penentu keberhasilan dalam penerapan sistem ini (Nordawan, 2010). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi penerapan SAP berbasis akrual telah diwajibkan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan (Permatasari, 2018).

Di sisi lain, akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Akuntansi pemerintahan lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi, bukan pada pencapaian laba. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran, kinerja keuangan, serta dampak dari kebijakan yang diambil terhadap masyarakat. Hal ini menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan Pemerintah Kota Medan tahun 2020 menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah telah tersusun secara sistematis dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang cukup baik. Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan adanya variasi sumber penerimaan yang mendukung keberlangsungan kegiatan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, dominasi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih perlu ditingkatkan (Arifin, 2012). Hal ini menjadi salah satu permasalahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2020. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis (Wawointana, 2023), faktual, dan akurat mengenai kondisi serta implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan serta berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020) (Hasanah & Fauzi, 2017). Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif berupa penjelasan terkait penerapan SAP berbasis akrual, serta data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan realisasi penerimaan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2020 serta studi pustaka dengan menelaah teori dan referensi terkait (Sugiyono, 2017). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan serta membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori dan ketentuan dalam SAP berbasis akrual. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, identifikasi komponen laporan keuangan yang relevan, analisis kesesuaian penerapan SAP berbasis akrual, serta penarikan kesimpulan untuk mengetahui tingkat penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa total pendapatan daerah mencapai sebesar 4.121.585.752 (000 rupiah). Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tercatat sebesar 1.509.483.588 (000 rupiah), yang didominasi oleh pajak daerah sebesar 1.195.850.163 (000 rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi sumber utama pendapatan asli daerah. Selain itu, kontribusi retribusi daerah sebesar 89.720.471 (000 rupiah), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 17.831.107 (000 rupiah), serta lain-lain PAD yang sah sebesar 206.081.848 (000 rupiah) turut melengkapi struktur PAD Kota Medan.

Selanjutnya, dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan sebesar 2.056.223.074 (000 rupiah) menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih cukup dominan dalam mendukung keuangan daerah. Dana ini terdiri dari bagi hasil pajak sebesar 214.341.621 (000 rupiah), bagi hasil bukan pajak/sumber

daya alam sebesar 2.843.349 (000 rupiah), dana alokasi umum sebesar 1.493.919.764 (000 rupiah), serta dana alokasi khusus sebesar 345.118.340 (000 rupiah). Lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar 555.879.089 (000 rupiah). Selain komponen pendapatan, terdapat pula pembiayaan daerah sebesar 504.099.366 (000 rupiah), sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar 506.651.260 (000 rupiah), serta penerimaan lainnya sebesar 1.071.189.930 (000 rupiah), sehingga jumlah keseluruhan penerimaan mencapai 4.625.685.118 (000 rupiah).

Berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut, dapat diketahui bahwa struktur penerimaan Pemerintah Kota Medan telah tersusun secara sistematis dan mencerminkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya klasifikasi pendapatan yang jelas serta pencatatan yang rinci terhadap setiap komponen penerimaan daerah (Norfaliza, 2015).

Jika dikaitkan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, penyajian data keuangan yang rinci dan terstruktur tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Susanty, 2022). Dalam SAP berbasis akrual, setiap transaksi keuangan diakui dan dicatat secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan kas maupun non kas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, dominasi dana perimbangan dalam struktur pendapatan juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2020 dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti optimalisasi sumber pendapatan daerah serta peningkatan kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem akrual mampu memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih komprehensif serta mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan daerah masih perlu dikembangkan secara lebih optimal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah agar penerapan SAP dapat berjalan lebih optimal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian yang lebih mendalam dengan menggunakan data yang lebih luas serta metode analisis yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Universitas Brawijaya.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2020). *Kota Medan dalam Angka 2020*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- BPK Perwakilan Provinsi Jambi. (n.d.). *Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh opini WTP*.
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Pemerintahan*. CV Batam Publisher.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis laporan keuangan*. Alfabeta.

- Fanselski, I., & Kalangi, L. (2015). Analisis Kesiapan Pemerintahan Kota Manado Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010. *Jurnal EMBA*, 3(1).
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. IN MEDIA.
- KSAP. (2010). *Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Norfaliza. (2015). Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(2).
- Permatasari, N. (2018). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual*. Universitas Negeri Padang.
- Prayogo, Y. (2023). *Analisis Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual dalam Laporan Keuangan Daerah*.
- Suartini, S., Sulistiyo, H., & Hasanuh, N. (2023). *Unsur-Unsur Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. CV Absolute Media.
- Sudiaranti, Ulupui, & Budiasih. (2026). *Pengaruh Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan SAP*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanty, M. (2022). *Akuntansi Pemerintah*. Media Sains Indonesia.
- Wawointana, W. J. (2023). *Evaluasi Penerapan SAP Berbasis Akrual pada BKAD Kota Manado*.